

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan wilayah pesisir dan lautan menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan perekonomian Indonesia. Secara ekonomis wilayah ini menjanjikan potensi komersial yang sangat besar karena memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang dapat pulih seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, rumput laut, dan sebagainya, dan yang tidak dapat pulih seperti; minyak dan gas, bahan tambang dan jasa lingkungan seperti pariwisata, perhubungan, energi kelautan, mitigasi bencana dan sebagai penyimpanan atau penyerap karbon sehingga mengurangi perubahan iklim, (Dahuri *et al.*, 1996).

Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang relatif besar, seperti: memiliki panjang garis pantai 1.973,246 km sudah termasuk Kab. Kepulauan Mentawai, luas perairan teritorial dan ZEE 186.580 km², potensi sumber daya perikanan laut yang cukup menjanjikan, antara lain ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol dan tenggiri, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, ikan karang, lobster dan cumi – cumi sebesar 565.100 ton per tahun, pulau – pulau kecil 185 buah, potensi mangrove 42.105,91 Ha, dan terumbu karang 39.982,16 Ha, potensi padang lamun 2.350, 81 Ha dan terdapat juga 32 lokasi pendaratan penyu serta telah diakomodir 6 (enam) kawasan menjadi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Selain potensi perikanan yang terdapat di laut, Sumatera Barat juga mempunyai potensi perikanan perairan umum sebesar 66.896,63 Ha yang terdiri dari danau, sungai, telaga, rawa dan lain – lain dan tersebar pada 19 Kabupaten/Kota. Dari luas perairan umum tersebut diatas yang mempunyai potensi untuk perikanan budidaya adalah sebesar 1.306 Ha (Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2014).

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang relatif besar tersebut ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat pesisir khususnya nelayan. Berdasarkan data kemiskinan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga miskin nelayan di pesisir Sumatera Barat sebesar 5.680 KK atau sekitar 94,79% dari seluruh rumah tangga miskin sektor perikanan di Sumatera Barat yang berjumlah 6.972 KK.

Tabel 1. Sebaran Jumlah Rumah Tangga Nelayan Miskin di Sumatera Barat

| No | Kabupaten / Kota | Rumah Tangga Miskin (KK) |
|--------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Pasaman Barat | 1.827 |
| 2 | Agam | 125 |
| 3 | Padang Pariaman | 338 |
| 4 | Pariaman | 129 |
| 5 | Padang | 1.190 |
| 6 | Pesisir Selatan | 1.861 |
| 7 | Kepulauan Mentawai | 210 |
| Jumlah | | 5.680 |

Sumber : BPS, Data PPLS 2008

Masyarakat pesisir yang pada umumnya adalah nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan, terutama secara ekonomi, dengan penghasilan yang selalu tergantung pada kondisi alam, maka akan sulit untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Pembangunan dikawasan pesisir pada umumnya dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan nelayan yang kehidupannya selalu bergantung pada penangkapan ikan di laut.

Menurut Kusnadi (2002), faktor penyebab kemiskinan nelayan terbagi dalam dua kelompok :

- a) Kemiskinan nelayan yang bersifat internal mencakup: 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan. 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan. 3) hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh. 4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan. 5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. 6) gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

- b) Kemiskinan yang bersifat eksternal mencakup: 1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial. 2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara. 3) kerus akan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir. 4) Penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. 5) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan. 6) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen. 7) terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa nelayan. 8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun. 9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan laut (*common property*) sebagai faktor produksi, jam kerja harus mengikuti oseanografis. Demikian juga pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga pekerjaan ini umumnya dikerjakan oleh lelaki. Hal ini mengandung arti bahwa keluarga yang lain (istri ataupun anak perempuan) tidak dapat membantu secara penuh, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya sering diidentikkan dengan masyarakat miskin.

Keadaan tersebut penting untuk menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri untuk melakukan upaya percepatan mengatasinya. Upaya yang diyakini secara cepat dapat mengatasi permasalahan masyarakat pesisir / nelayan diatas adalah mengembangkan jumlah jenis usaha setiap rumah tangga nelayan dan masyarakat pesisir lainnya untuk mencapai efesiensi dalam usaha perikanan terpadu yang saling menguntungkan dimana setiap masyarakat pesisir minimal dapat berusaha dengan dua atau lebih kegiatan perikanan yang dipadukan dengan kegiatan sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, industri dan sebagainya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir adalah Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pesisir (GPEMP). Gerakan ini mengacu pada filosofi ekonomi di Minangkabau yaitu; “Padi Masak, Jaguang Maupiah, Taranak Bakambang Biak, Coklat Maambiak, Ikan Mambangik, Rimbo Tajago dan Anak Tasakolahan Pulo. Program ini dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perindag, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai *leading sector*-nya. Tujuan program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir adalah untuk pengentasan kemiskinan bagi rumah tangga masyarakat di wilayah pesisir dengan peningkatan jam kerja efektif melalui integrasi usaha terpadu dengan keterampilan lain seperti berkebun dan bertani, dan sebagainya.

Program ini menggunakan data kemiskinan PPLS tahun 2008 yang dilakukan oleh BPS. Data kemiskinan tersebut dijadikan sebagai basis gerakan program yang dilaksanakan pada tahun 2012 s/d 2015. Sasaran pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir adalah terbinanya usaha ekonomi rumah tangga miskin sektor perikanan di wilayah pesisir sebanyak 5.680 KK yang tersebar pada 7 (tujuh) kabupaten/kota wilayah pesisir yang terdiri dari 42 kecamatan dan 89 nagari/desa/kelurahan. Dan untuk Kota Padang, terdapat 1.190 KK miskin yang tersebar di 6 kecamatan (Kec. Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Begalung) dan 22 kelurahan.

Di sepanjang kawasan pesisir Kota Padang, Kelurahan Pasie Nan tigo Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu sentra perikanan sekaligus pemukiman masyarakat pesisir. Namun, dari data yang terdapat pada tabel 2 dibawah ini, dapat dilihat bahwa kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah kepala keluarga (kk) miskin terbanyak yaitu urutan kedua jumlah kk miskin terbanyak dari data keseluruhan jumlah kk miskin di Kota Padang.

Tabel 2. Sebaran Jumlah Rumah Tangga Nelayan Miskin di Kota Padang

| No | Kecamatan | Kelurahan | Rumah Tangga Miskin (KK) |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Bungus Teluk Kabung | Bungus Barat | 40 |
| | | Bungus Selatan | 80 |
| | | Tl. Kabung Selatan | 3 |
| | | Tl. Kabung Utara | 106 |
| | | Tl. Kabung Tengah | 49 |
| 2 | Lubuk Begalung | Gates Nan XX | 287 |
| 3 | Padang Selatan | Teluk Bayur | 6 |
| | | Air Manis | 26 |
| | | Batang Arau | 72 |
| | | Bukit Gado –Gado | 1 |
| 4 | Padang Barat | Berok Nipah | 38 |
| | | Purus | 61 |
| | | Olo | 6 |
| | | Rimbo Kaluang | 33 |
| | | Lolong Belanti | 14 |
| 5 | Padang Utara | Ulak Karang Selatan | 53 |
| | | Air Tawar Barat | 48 |
| | | Parupuak Tabing | 54 |
| 6 | Koto Tengah | Padang Sarai | 5 |
| | | Pasia Nan Tigo | 180 |
| | | Bungo Pasang | 11 |
| | | Lubuk Buayo | 17 |
| Jumlah | | 22 | 1.190 |

Sumber : BPS, Data PPLS 2008

Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir ini dilaksanakan dengan memperkuat teknologi dan sumber daya manusia masyarakat pesisir dengan berbasiskan usaha yang telah dilakukan oleh nelayan selama ini melalui pengembangan alat gerak perahu, pengembangan alat tangkap perikanan yang lebih baik, dan sebagainya. Selain itu, program ini mendorong pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) lainnya, baik yang masih

berbasis sumber daya kelautan dan perikanan tetapi tidak berorientasi di laut, seperti pengembangan usaha budidaya ikan di tambak, muara sungai, kolam pekarangan dan pengembangan usaha diversifikasi olahan produk hasil perikanan dengan skala industri rumah tangga serta memfasilitasi dan mengembangkan usaha lainnya di luar bidang kelautan dan perikanan dengan melihat potensi sumber daya alam yang ada, seperti usaha perternakan, pertanian, perkebunan, pariwisata, industri rumah tangga/industri kreatif, perbengkelan dan sebagainya.

Program ini sudah selesai dilaksanakan 3 (tiga) tahun. Namun, belum diketahui bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya terhadap orientasi sumber pendapatan keluarga nelayan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya Terhadap Orientasi Sumber Pendapatan Keluarga Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”.

B. Masalah Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah, sebab salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah mengurangi kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, butuh usaha bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada relatif besar, namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir / nelayan. Masyarakat pesisir masih perlu didorong untuk meningkatkan capaian pemanfaatan potensi tersebut dengan memberikan pembinaan dan bantuan teknologi seperti pengembangan alat gerak perahu dan alat tangkap yang lebih baik.

Namun, masyarakat pesisir tidak bisa hanya terus bergantung dari penangkapan di laut saja karena waktu produktif masyarakat pesisir / nelayan untuk bekerja relatif sedikit, hari produktif ke laut hanya maksimal 20 hari per bulan atau hanya 75% dari hari produktif petani, peternak dan sebagainya (Petunjuk Pelaksanaan GPEMP Sumatera Barat 2012). Kebiasaan atau budaya masyarakat pesisir/nelayan pada saat tidak melaut sangat tidak produktif yaitu seperti duduk – duduk di warung, berjudi dan lain – lain. Oleh karena itu perlu

didorong pengembangan mata pencaharian alternatif dengan peningkatan jam kerja efektif melalui integrasi usaha terpadu dengan keterampilan lain dengan melihat potensi sumber daya yang ada seperti dengan bertani, berkebun, bengkel, berdagang, dll. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusnadi (2002) bahwa “Rumah tangga nelayan akan menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan jika hanya bertumpu pada aktivitas dari melaut, karena sumber daya perikanan terus mengalami penipisan. Menurutnya, untuk bisa bertahan dan meningkatkan ekonomi rumah tangga, rumah tangga nelayan harus mengembangkan strategi-strategi ekonomi yang beragam di luar sektor penangkapan, seperti berdagang, bertani dan berternak”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dilaksanakan di Kelurahan Pasie Nan Tigo ?
2. Bagaimana dampak Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap orientasi sumber pendapatan keluarga nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya bagi nelayan di wilayah pesisir.

Secara rinci tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Program Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Ekonomi Pesisir dilaksanakan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.
2. Untuk menganalisis dampak Program Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Ekonomi Pesisir terhadap orientasi sumber pendapatan keluarga nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk memberikan manfaat berupa:

1. Masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan perbaikan yang perlu dilakukan.
2. Masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai dampak Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap orientasi sumber pendapatan keluarga nelayan.
3. Masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk perbaikan ke depannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada di wilayah pesisir.

